

Dari Kudeta ke Krisis: Kudeta Myanmar dan Dampaknya terhadap Keamanan Manusia dan Stabilitas Regional

JISPO
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2025, Vol. 15, No. 1: 119-142
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>
© The Author(s) 2025

Hana Novia*

Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Abstrak

Kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021 telah menimbulkan krisis politik dan kemanusiaan yang mendalam, yang tidak hanya berdampak pada situasi domestik tetapi juga mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara. Berlandaskan teori sekuritisasi dari Copenhagen School dan kerangka keamanan manusia dari United Nations Development Programme (UNDP), penelitian ini menganalisis dampak multidimensional kudeta, khususnya terhadap keamanan personal, politik, dan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana instabilitas internal Myanmar berimplikasi lintas batas serta menilai kapasitas kolektif ASEAN dalam merespons krisis tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder berupa laporan organisasi internasional, dokumen resmi ASEAN, dan kajian akademik. Temuan menunjukkan bahwa represi militer telah memicu pengungsian besar-besaran—lebih dari 440.000 orang sejak kudeta—serta runtuhnya layanan kesehatan yang semakin diperparah oleh pandemi COVID-19. Arus migrasi paksa ke negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia menegaskan dimensi regional krisis ini, sekaligus mengungkap keterbatasan ASEAN yang masih terikat pada prinsip non-intervensi dan lemahnya mekanisme penegakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis Myanmar menegaskan urgensi reformulasi tata kelola keamanan kawasan yang lebih berorientasi pada hak asasi manusia dan perlindungan kemanusiaan. Kontribusi utama penelitian ini adalah menghadirkan perspektif keamanan manusia sebagai lensa sentral dalam studi keamanan kawasan yang selama ini didominasi pendekatan negara-sentrals. Implikasi kebijakan yang ditawarkan mencakup pengaktifan mekanisme ASEAN Political-Security Community,

* Corresponding author:

Hana Novia

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

Email: hananovia@unimal.ac.id

penguatan perlindungan pengungsi, serta mendorong dialog regional yang inklusif untuk menjaga perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara.

Kata-kata Kunci

Kudeta Myanmar, keamanan manusia, ASEAN, sekuritisasi, stabilitas regional

Abstract

The 2021 military coup in Myanmar has generated profound political and humanitarian crises that extend beyond national borders and pose serious challenges to Southeast Asian regional stability. Rooted in the securitization theory of the Copenhagen School and the human security framework of the United Nations Development Programme (UNDP), this study examines the multidimensional impacts of the coup, particularly on personal, political, and health security. The research aims to analyse how Myanmar's internal instability reverberates across the region and to assess ASEAN's collective capacity to respond. This study employs a qualitative descriptive method, relying on secondary sources including reports from international organizations, official ASEAN documents, and scholarly analyses. The findings reveal that widespread military repression has resulted in large-scale displacement—over 440,000 people since the coup—while the collapse of health services, compounded by the COVID-19 pandemic, has worsened civilian vulnerability. Forced migration flows to neighbouring countries such as Thailand, Malaysia, and Indonesia illustrate the regional dimension of the crisis, highlighting ASEAN's limited effectiveness due to its adherence to non-intervention and weak enforcement mechanisms. The study concludes that Myanmar's crisis underscores the need to reformulate regional security governance in ways that prioritize human rights and humanitarian protection. Its main contribution lies in advancing human security as a central lens within regional security studies, traditionally dominated by state-centred approaches. Policy implications include the activation of ASEAN Political-Security Community mechanisms, stronger refugee protection, and inclusive regional dialogue to safeguard peace and stability in Southeast Asia.

Keywords

Myanmar coup, human security, ASEAN, securitization, regional stability

Pendahuluan

Myanmar merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan sejarah politik yang panjang, di mana dinamika kekuasaan selalu sangat dipengaruhi oleh militer atau Tatmadaw. Sejak kudeta militer 1962, Myanmar berada di bawah pemerintahan otoriter yang menutup ruang partisipasi politik sipil. Meski sejak 2011 terjadi transisi menuju demokrasi, konstitusi 2008 tetap memberikan priviliee besar kepada militer, termasuk jatah 25 persen kursi parlemen serta kendali atas tiga kementerian strategis: Pertahanan, Dalam Negeri, dan Urusan Perbatasan (Ware and Skidmore 2021). Dengan demikian, militer tidak pernah sepenuhnya melepaskan kontrol atas negara.

Pemilu nasional pada November 2020 menjadi titik penting transisi politik, ketika National League for Democracy (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi meraih kemenangan besar, mengalahkan partai pro-militer, Union Solidarity and Development Party (USDP). Kemenangan telak NLD memperkuat pemerintahan sipil sekaligus menimbulkan ketegangan dengan militer, yang menganggap hasil pemilu mengancam posisi strategis mereka. Situasi ini memuncak pada 1 Februari 2021 ketika militer melakukan kudeta, menangkap Presiden Win Myint dan Aung San Suu Kyi, serta membatalkan pelantikan parlemen terpilih (Connelly and Loong 2023).

Kudeta yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 itu menimbulkan krisis multidimensi: kekerasan bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, pengungsian massal, serta runtuhnya layanan sosial. Data PBB mencatat ratusan ribu orang terpaksa mengungsi; sekitar 223.000 orang masih terlantar di dalam negeri dan 165.000 lainnya di kawasan Asia Tenggara. Pada November 2021, lebih dari tiga juta orang terdampak krisis kemanusiaan akibat konflik bersenjata, pandemi, dan krisis ekonomi, sementara akses bantuan terhambat oleh pembatasan militer (UN News 2021). Dengan demikian, kudeta Myanmar tidak hanya mengguncang stabilitas politik domestik, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan manusia di tingkat regional.

Sejumlah penelitian telah menyoroti kegagalan transisi demokrasi Myanmar. Ganesan (2023) menekankan bahwa kudeta 2021 mencerminkan kegagalan transisi demokrasi berbasis konstitusi 2008 yang dirancang militer, dengan perlawanan sipil menjadi bentuk dorongan menuju demokrasi federal. Ia menambahkan bahwa demokrasi Myanmar mengalami backsliding akibat struktur militer yang dominan.

Meskipun ASEAN berhasil menjaga stabilitas regional melalui diplomasi strategis, organisasi ini terbukti lemah dalam menangani konflik internal anggotanya, termasuk kudeta Myanmar. Khai (2023) menemukan bahwa lebih dari 1,9 juta pengungsi internal mengalami penurunan signifikan dalam kesehatan fisik dan mental akibat blokade militer terhadap akses layanan kesehatan.

Kajian Kusuma (2023) menyoroti meningkatnya risiko infeksi COVID-19 di kamp pengungsian akibat intervensi militer terhadap bantuan medis. Molyneux (2024) memperlihatkan bagaimana penggunaan senjata peledak oleh militer justru menjadikan warga sipil sebagai target langsung, melanggar hukum humaniter internasional. Mohapatra (2024) menekankan kompleksitas krisis politik dan kemanusiaan yang multidimensi, sedangkan Pearson et al. (2025) menggarisbawahi dampaknya terhadap kerentanan sosial-ekonomi dan kekerasan berbasis gender.

Kajian-kajian tersebut memperlihatkan dua kecenderungan utama: pertama, analisis dominasi struktural militer dalam sistem politik Myanmar dan kegalannya dalam proses transisi demokrasi; dan kedua, fokus pada dimensi krisis kemanusiaan pascakudeta, termasuk kesehatan, migrasi, dan pelanggaran HAM. Literatur terkini juga mulai mengaitkan isu Myanmar dengan keamanan manusia (*human security*) yang mencakup aspek multidimensi: kesehatan, ekonomi, politik, dan sosial.

Meskipun telah ada banyak studi, sebagian besar belum secara komprehensif menghubungkan keamanan manusia dengan politik regional melalui perspektif sekuritisasi. Kajian yang menelaah bagaimana krisis Myanmar dipersepsikan sebagai ancaman eksistensial oleh negara-negara ASEAN serta bagaimana hal ini memengaruhi respons diplomatik masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam tentang konstruksi ancaman multidimensi di Myanmar terhadap keamanan manusia dan implikasinya bagi kebijakan regional.

Karena itu, studi ini membahas bagaimana kudeta militer Myanmar 2021 mengonstruksi ancaman terhadap keamanan manusia dan politik di tingkat domestik maupun kawasan, serta bagaimana proses sekuritisasi ini memengaruhi respons ASEAN dan aktor internasional. Ia bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dampak kudeta Myanmar terhadap keamanan manusia multidimensi, termasuk aspek politik, kesehatan, ekonomi, dan sosial, serta menelaah bagaimana krisis tersebut dipersepsikan dan dikonstruksi sebagai ancaman eksistensial melalui proses sekuritisasi.

Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengevaluasi efektivitas respons ASEAN dan aktor internasional terhadap krisis Myanmar, dengan hipotesis bahwa kudeta telah menciptakan ancaman multidimensi terhadap keamanan manusia yang disekuritisasi secara terbatas, sehingga menghasilkan respons diplomatik yang parsial dan kurang efektif.

Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi akademik dengan menawarkan perspektif baru mengenai hubungan antara kudeta militer, keamanan manusia, dan sekuritisasi di Asia Tenggara. Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan lembaga internasional mengenai tantangan diplomasi dalam menghadapi krisis multidimensi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang keamanan manusia dan politik di Asia Tenggara, sekaligus memberikan dasar analitis bagi perumusan strategi kolektif yang lebih efektif dalam merespons krisis Myanmar.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*). Data yang dianalisis berasal dari literatur akademik, laporan lembaga internasional, dokumen resmi ASEAN, serta publikasi organisasi masyarakat sipil yang relevan dengan krisis Myanmar sejak kudeta militer Februari 2021. Sumber-sumber tersebut dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dimensi keamanan manusia, dinamika politik domestik Myanmar, serta implikasinya terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka konseptual keamanan manusia dan teori sekuritisasi. Temuan empiris mengenai represi politik, runtuhnya sistem kesehatan, dan migrasi paksa dipadukan dengan konsep-konsep teoretis untuk menafsirkan bagaimana isu-isu tersebut dikonstruksikan sebagai ancaman non-tradisional. Proses analisis bersifat deskriptif-analitis, yaitu menguraikan data secara sistematis sekaligus menafsirkan maknanya dalam konteks hubungan internasional dan keamanan regional.

Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan analisis komparatif dalam tataran literatur, dengan cara mengaitkan temuan lapangan dengan pandangan para penulis dan lembaga yang menjadi rujukan. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti tidak hanya mendeskripsikan

situasi krisis Myanmar, tetapi juga menempatkannya dalam dialog kritis dengan literatur akademik dan laporan internasional, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih tajam dan kontekstual.

Sekuritisasi Kudeta Myanmar

Dalam kajian hubungan internasional kontemporer, teori sekuritisasi dari Copenhagen School menawarkan kerangka untuk memahami bagaimana suatu isu dikonstruksikan sebagai ancaman keamanan melalui tindakan diskursif atau *speech act*. Menurut Paul D. Williams (2012), isu keamanan tidak serta merta muncul dari sifat alamiahnya, melainkan karena dikonstruksikan sebagai ancaman eksistensial oleh aktor tertentu yang memiliki otoritas untuk menyatakannya. Aktor ini disebut securitizing actor. Buzan et al. (1998) menjelaskan bahwa proses sekuritisasi mencakup tiga elemen utama: aktor sekuritisasi, objek referensial (*referent object*), dan audiens. Suatu isu dianggap “tersekuritisasi” ketika audiens menerima klaim ancaman yang disampaikan oleh aktor sekuritisasi. Dengan demikian, sekuritisasi bukan sekadar mengenali ancaman, tetapi membentuknya melalui konstruksi sosial dan legitimasi politik.

Williams (2012) menekankan bahwa teori sekuritisasi berpijakan pada konstruktivisme sosial, yang memandang isu keamanan sebagai hasil wacana dan praktik sosial oleh aktor yang memiliki kekuasaan institusional. Dalam kerangka ini, isu yang awalnya berfokus pada negara sebagai referent object kini meluas mencakup individu dan komunitas sipil. Artinya, audiens memegang peran krusial dalam proses sekuritisasi karena penerimaan mereka membuka ruang bagi langkah-langkah luar biasa. Dalam konteks Myanmar, sekuritisasi tidak hanya berlaku pada isu militer, tetapi juga meluas ke aspek keamanan manusia, seperti kesehatan publik dan pengungsian, yang menempatkan individu dan komunitas sipil sebagai objek utama perlindungan.

Dalam kasus kudeta Myanmar 2021, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tampil sebagai aktor sekuritisasi. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres secara terbuka menyatakan bahwa kudeta dan represi militer merupakan ancaman serius terhadap perdamaian, stabilitas regional, dan hak asasi manusia. Pernyataan ini berfungsi sebagai speech act yang mengangkat isu dari ranah politik menjadi masalah keamanan yang menuntut tindakan luar biasa. Objek referensial yang diproteksi dalam hal

ini adalah masyarakat sipil Myanmar, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan minoritas etnis Rohingya yang mengalami kekerasan, migrasi paksa, serta pelanggaran HAM. Dengan demikian, secara analitis dapat ditegaskan bahwa PBB telah melakukan sekuritisasi krisis Myanmar dengan menempatkannya sebagai ancaman non-tradisional yang menuntut keterlibatan komunitas internasional secara mendesak.

Sekuritisasi PBB tidak hanya tampak dalam pernyataan politik, tetapi juga dalam laporan resmi dan resolusi Dewan HAM. Misalnya, laporan tahunan Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM) mendokumentasikan pelanggaran berat seperti penyiksaan, kekerasan seksual, dan penghilangan paksa oleh Tatmadaw setelah kudeta (United Nations 2023). Laporan-laporan ini membentuk narasi keamanan yang memperkuat legitimasi sekuritisasi di mata komunitas internasional. Selain itu, media internasional dan organisasi non-pemerintah juga berperan sebagai aktor pendukung yang menyebarkan narasi ancaman. Dalam logika Copenhagen School, audiens internasional yang menerima klaim ancaman ini kemudian melegitimasi tindakan luar biasa, termasuk sanksi internasional, embargo senjata, maupun intervensi kemanusiaan. Namun, implementasi sekuritisasi ini kerap terbentur dinamika geopolitik: Tiongkok dan Rusia, misalnya, berulang kali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sekuritisasi terbentuk secara normatif, realisasinya sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik global.

Respons ASEAN memperlihatkan keterbatasan yang berbeda. Melalui *ASEAN Political and Security Community* (APSC), negara-negara Asia Tenggara menekankan kerjasama dan rasa kebersamaan, tetapi tetap berpegang pada prinsip non-intervensi (Caballero-Anthony 2020). Perbedaan posisi antaranggota—dengan Thailand dan Kamboja yang lebih akomodatif terhadap junta, sementara Indonesia dan Malaysia mendorong sikap lebih tegas (Gayatri 2021)—menghambat tercapainya konsensus yang kuat. Meski ASEAN meluncurkan *Five Point Consensus* pada KTT April 2021 di Jakarta, yang mencakup penghentian kekerasan, dialog konstruktif, penunjukan utusan khusus, pemberian bantuan kemanusiaan, dan akses ke semua pihak (ASEAN 2021), implementasinya berjalan stagnan. Junta menolak membuka akses penuh bagi utusan ASEAN dan enggan berdialog dengan oposisi, termasuk National Unity Government (NUG). Studi Kavi Chongkittavorn (2022) menyoroti lemahnya mekanisme penegakan dan perbedaan kepentingan antarnegara sebagai faktor utama yang mereduksi

efektivitas konsensus ini. Akibatnya, kekerasan dan pelanggaran HAM tetap berlangsung, memperlihatkan bahwa ASEAN belum mampu menjadi aktor regional yang efektif dalam melindungi warga sipil Myanmar.

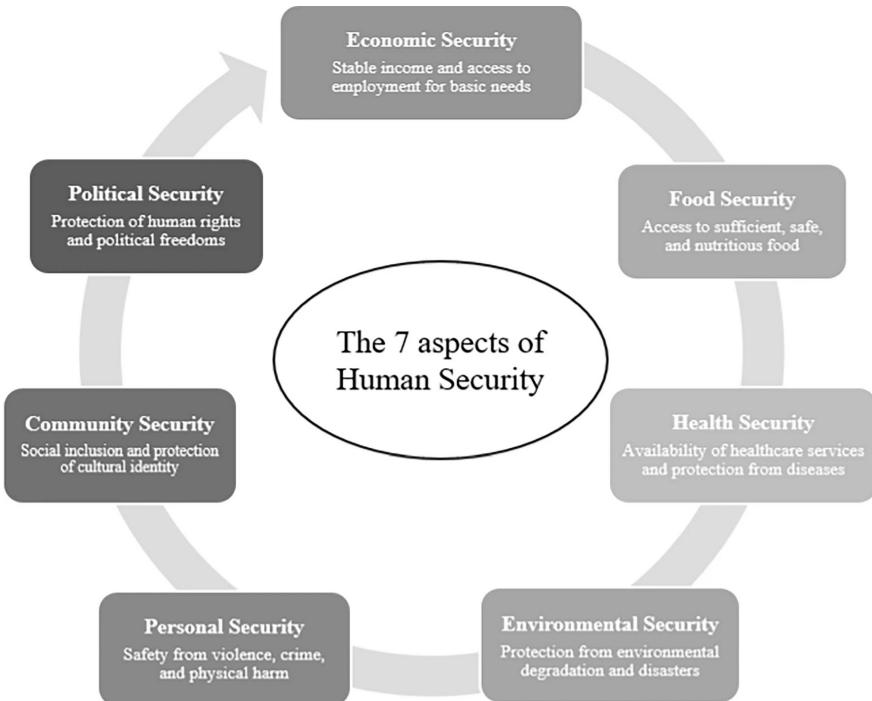
Dengan demikian, penerapan teori sekuritisasi pada krisis Myanmar mengungkapkan bahwa konstruksi ancaman tidak lagi terbatas pada isu militer negara-sentris, tetapi juga mencakup dimensi keamanan manusia. Analisis ini menegaskan bahwa sekuritisasi kudeta Myanmar memperluas objek keamanan ke individu dan komunitas sipil, namun respons internasional—baik PBB maupun ASEAN—masih terfragmentasi dan terbatas. Artikel ini berupaya mengisi celah dalam literatur dengan menyoroti bagaimana isu-isu non-militer seperti kesehatan publik, pengungsi, dan perlindungan sipil dikonstruksikan sebagai masalah keamanan, sekaligus menunjukkan tantangan implementasi sekuritisasi dalam konteks geopolitik dan diplomasi regional.

Kudeta Myanmar dalam Perspektif Keamanan Manusia

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keamanan manusia (*human security*) melalui dua prinsip utama: kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari kekurangan, dengan individu sebagai subjek utama perlindungan. Dalam konteks globalisasi, ancaman keamanan semakin beragam dan kompleks, mencerminkan munculnya “perang-perang baru” yang ditandai oleh pergeseran aktor, tujuan, dan metode konflik (Kaldor 2013). Hal ini membuat pendekatan keamanan tradisional yang berfokus pada negara tidak lagi memadai. Konsep keamanan manusia menawarkan paradigma alternatif dengan menekankan pembangunan manusia dan kesejahteraan, bukan sekadar perlindungan dari kekerasan fisik.

Kerangka yang diperkenalkan UNDP dalam *Human Development Report* 1994 menjadi acuan penting untuk memahami krisis Myanmar. Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, konsep ini menggeser fokus dari negara ke individu dengan tujuh dimensi keamanan: ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik (United Nations Development Programme 2004). Perbedaan kunci antara pembangunan manusia (*human development*) dan keamanan manusia terletak pada fokusnya: pembangunan manusia menekankan strategi jangka panjang, sedangkan keamanan manusia menekankan perlindungan segera dalam kondisi krisis. Di sinilah gagasan “*responsibility to protect*” menegaskan

kewajiban negara dan komunitas internasional untuk melindungi warga sipil, meski sering berbenturan dengan prinsip kedaulatan (Chandler 2012).



Gambar 1: The Seven Aspects of Human Security

Sumber: Discover Sustainability (2025)

Kudeta militer Myanmar 2021 menunjukkan dengan jelas bagaimana represi politik menciptakan ancaman multidimensi terhadap keamanan manusia. Ancaman tersebut meluas melampaui isu politik semata, mencakup keamanan personal, kesehatan, dan politik. Pendekatan keamanan manusia memungkinkan identifikasi menyeluruh atas kerentanan sipil, sekaligus menekankan bahwa keamanan bukan hanya ketiadaan konflik bersenjata, tetapi juga jaminan hidup bermartabat bebas dari rasa takut, kelangkaan, dan pelanggaran struktural.

Keamanan personal menjadi dimensi paling nyata yang runtuh pascakudeta. Ribuan warga sipil menjadi korban penembakan massal,

penyiksaan, kekerasan seksual, serta penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis prodemokrasi, perempuan, dan anak-anak (Simpson and Farrelly 2021). Rasa takut yang merata di masyarakat menandakan hilangnya perlindungan dasar atas keselamatan individu. Keamanan kesehatan pun terganggu. Pandemi COVID-19 yang telah membebani sistem kesehatan diperparah oleh represi politik: rumah sakit ditutup, tenaga medis ditangkap karena mendukung gerakan pembangkangan sipil, dan distribusi vaksin terganggu (Marash 2021). Akibatnya, kerentanan terhadap penyakit meningkat, sementara kesenjangan akses kesehatan semakin lebar, terutama bagi kelompok rentan.

Dimensi keamanan politik mengalami pelemahan yang sama seriusnya. Kudeta mengikis kebebasan sipil melalui penangkapan anggota parlemen terpilih, pemblokiran media independen, dan pembungkaman oposisi. Ruang politik demokratis ditutup rapat, menegaskan bahwa kudeta bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi juga serangan langsung terhadap hak-hak dasar warga (King 2022).

Dengan demikian, krisis Myanmar menggambarkan ancaman non-tradisional yang saling terkait, di mana kekerasan negara merembes ke ranah personal, kesehatan, dan politik masyarakat. Pendekatan keamanan manusia memberikan kerangka analitis yang lebih komprehensif untuk memahami dampak multidimensi ini, menempatkan manusia dan hak-hak fundamental mereka sebagai pusat dari isu keamanan.

Keamanan Personal dalam Tekanan Represi Militer dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Menurut *Human Development Report 1994*, keamanan personal mencakup perlindungan individu dari berbagai ancaman: kekerasan negara seperti penyiksaan fisik; agresi negara lain melalui perang; ketegangan etnis; kejahatan atau kekerasan jalanan; serta ancaman berbasis gender dan usia, termasuk pemerkosaan, kekerasan domestik, penganiayaan anak, pekerja anak, dan perdagangan anak (United Nations Development Programme 2004). Henry Shue (1996) menekankan bahwa ancaman terhadap keamanan fisik adalah salah satu bentuk kerentanan paling serius, karena dapat menggugurkan pemenuhan hak-hak lainnya. Oleh karena itu, keamanan personal harus dipahami bukan dari perspektif negara, melainkan dari sudut pandang individu.

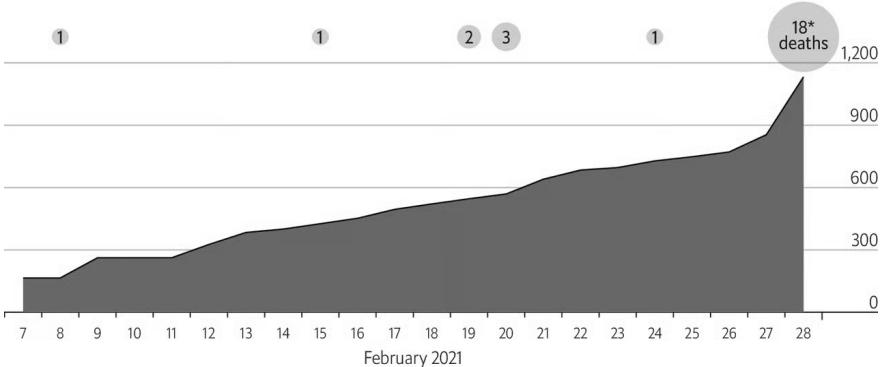
Dalam konteks konflik bersenjata, dimensi keamanan personal menegaskan pentingnya perlindungan atas kehidupan, kebebasan, dan integritas fisik. Pola represi militer di sejumlah negara yang mengalami krisis politik—seperti Myanmar, Suriah, dan Sudan—menunjukkan bagaimana negara justru dapat menjadi aktor utama pelanggaran. Perempuan merupakan kelompok paling rentan, tidak hanya menghadapi kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan seksual yang digunakan sebagai instrumen intimidasi dan represi (Human Rights Watch 2024). Dalam kondisi demikian, akses terhadap perlindungan hukum, tempat tinggal, dan layanan dasar sering kali hilang, sehingga keamanan personal masyarakat berada pada titik paling rapuh.

Situasi di Myanmar pascakudeta 2021 memperlihatkan gambaran nyata dari krisis tersebut. Amnesty International dan Human Rights Watch mendokumentasikan praktik penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pembunuhan terhadap warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. UNHCR mencatat lebih dari satu juta warga Rohingya mengalami kekerasan seksual dan pengusiran paksa, pelanggaran yang secara langsung meruntuhkan fondasi keamanan personal (The UN Refugee Agency 2024). Kekerasan bersenjata dan intimidasi yang sistematis tidak hanya menimbulkan korban fisik, tetapi juga trauma berkepanjangan, rasa takut kolektif, dan hilangnya akses terhadap hak-hak dasar lainnya.

Grafik 1 memperlihatkan jumlah korban tewas harian sejak kudeta militer Myanmar pada 1 Februari 2021 hingga akhir Februari. Puncak eskalasi terjadi pada 28 Februari, ketika pasukan keamanan menembaki kerumunan demonstran di berbagai kota, termasuk Yangon—pusat komersial negara—and Mandalay. Sedikitnya 18 orang tewas, menjadikan hari itu sebagai hari paling mematikan sejak awal protes menurut Kantor HAM PBB. Media pemerintah melaporkan 479 penangkapan, sementara Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) memperkirakan jumlah sebenarnya melebihi 1.000 orang, meskipun belum seluruhnya terdokumentasi (The Economist 2021). Peristiwa ini menandai lonjakan tajam dalam kekerasan, setelah sebelumnya aparat hanya menggunakan peluru karet dan meriam air.

The screw tightens

Myanmar, cumulative arrests and deaths related to military coup of February 1st 2021



Source: Assistance Association for Political Prisoners

*UN Human Rights Office estimate

The Economist

Grafik 1. Jumlah Korban Tewas pada Kudeta Militer Myanmar in February 2021

Sumber: The Economist (2021)

Sejak penggulingan pemerintahan sipil, ribuan hingga ratusan ribu warga Myanmar turun ke jalan setiap hari untuk menolak kudeta. Pada awalnya, militer menahan diri dari tindakan represif berskala besar, berbeda dengan tragedi protes 1988 dan 2007 yang menewaskan ribuan orang (The Economist 2021). Namun, ketika demonstrasi berlanjut, pendekatan junta berubah semakin brutal. Penggunaan peluru tajam, pembubaran paksa, hingga penyiksaan tahanan politik menunjukkan bahwa negara, yang semestinya melindungi warganya, justru bertindak sebagai pelaku ancaman utama terhadap keselamatan mereka. Tindakan represif ini mencerminkan kegagalan fundamental negara dalam menjamin keamanan personal individu.

Keamanan personal menjadi salah satu isu paling genting yang dihadapi warga sipil Myanmar. Negosiasi perdamaian selama bertahun-tahun lebih banyak berfokus pada pembentukan tentara federal, pengembangan sektor keamanan, serta agenda pelucutan senjata dan reintegrasi kelompok bersenjata etnis, ketimbang pada perlindungan keamanan manusia. Akibatnya, isu perlindungan sipil sering terpinggirkan. Dalam konteks ini, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan. Laporan

UN Women (2021) menunjukkan lonjakan kasus kekerasan berbasis gender, termasuk pemerkosaan dan kekerasan domestik, yang kian memburuk selama pandemi COVID-19 di Asia Tenggara. Ketergantungan sosial-ekonomi perempuan yang tinggi serta lemahnya sistem perlindungan membuat banyak korban tidak dapat mengakses keadilan. Sementara itu, anak-anak menghadapi pelanggaran berat berupa pekerja anak hingga perekrutan paksa oleh kelompok bersenjata.

Dengan demikian, dimensi keamanan personal dalam kasus Myanmar menegaskan adanya pola pelanggaran sistematis terhadap hak-hak dasar manusia: hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, serta hak atas rasa aman. Kudeta militer dan represi yang menyertainya memperlihatkan bagaimana negara justru menjadi sumber ancaman eksistensial bagi warganya, meninggalkan luka mendalam pada tatanan sosial dan generasi mendatang.

Keamanan Politik: Ketidakstabilan, Represi, dan Arus Migrasi Paksa

Keamanan politik, dalam kerangka keamanan manusia, merujuk pada perlindungan individu dari pelanggaran hak-hak politik dan sipil oleh negara maupun aktor non-negara. Dimensi ini mencakup kebebasan berekspresi, partisipasi politik, perlindungan dari represi, serta hak untuk ikut serta dalam pemerintahan yang adil dan representatif. Sistem politik yang hanya melayani kepentingan elite tanpa keterwakilan setara merusak keamanan politik, memicu rasa terpinggiran, menurunkan kepercayaan publik, dan meningkatkan risiko instabilitas. Represi politik merupakan bentuk ancaman utama: penahanan sewenang-wenang, pembungkaman kritik, pelarangan demonstrasi, hingga pembatasan kebebasan pers (United Nations 2009). Dalam kerangka keamanan manusia, kondisi ini menghapus rasa aman warga untuk berpartisipasi dalam politik tanpa takut tindakan represif.

Kudeta militer Myanmar pada 2021 memperlihatkan keruntuhannya paling nyata dalam dimensi ini. Kudeta bukan hanya merampas hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara demokratis, tetapi juga membuka jalan bagi gelombang represi sistematis terhadap oposisi dan masyarakat sipil (Roth 2022). Penindasan politik ini berkelindan dengan masalah jangka panjang, seperti penganiayaan sistematis terhadap etnis Rohingya yang bahkan telah digolongkan sebagai genosida, sekaligus penolakan hak

demokratis mereka (Rainer, Elise, and Anish Goel 2020). Ketidakmampuan negara melindungi warga dan menegakkan hak asasi manusia kerap dipandang sebagai dasar moral bagi komunitas internasional untuk turun tangan melalui prinsip tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*) (Situmorang 2021).

Kegagalan negara menyediakan jaminan keadilan dan perlindungan politik menempatkan masyarakat sipil Myanmar dalam kondisi rawan. Hal ini tidak hanya mengikis kepercayaan publik terhadap institusi politik, tetapi juga memperdalam ketidakstabilan jangka panjang di dalam negeri dan kawasan. Tuntutan publik untuk mengembalikan pemerintahan sah yang terpilih secara demokratis mencerminkan penolakan terhadap dominasi militer yang merebut kekuasaan secara ilegal (Sharma 2022).

Salah satu dampak paling signifikan dari runtuhnya keamanan politik adalah meningkatnya arus migrasi paksa. Ribuan warga sipil, aktivis politik, dan kelompok minoritas, terutama etnis Rohingya, melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Thailand, India, dan Bangladesh. Mereka mencari perlindungan dari kekerasan militer, penangkapan sewenang-wenang, dan penyiksaan. Perpindahan ini tidak hanya menandai kegagalan negara melindungi warganya, tetapi juga memperburuk krisis kemanusiaan lintas batas, menimbulkan tantangan baru bagi pengelolaan perbatasan, bantuan kemanusiaan, dan kebijakan suaka regional (Chambers and Cheesman 2024).

Namun, migrasi paksa tidak serta menjamin keselamatan. Banyak pengungsi Myanmar menghadapi penolakan, deportasi, serta kekerasan di negara tujuan, hidup dalam kondisi serba kekurangan dengan akses terbatas terhadap kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum (International Crisis Group 2021). Dengan demikian, krisis politik domestik Myanmar tidak hanya meruntuhkan keamanan politik di dalam negeri, tetapi juga memunculkan konsekuensi serius bagi stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara secara lebih luas.

Keamanan Kesehatan: Kolapsnya Sistem Kesehatan di Tengah Pandemi dan Kudeta

Dalam kerangka keamanan manusia, UNDP menekankan bahwa keamanan kesehatan mencakup akses terhadap layanan kesehatan dasar, obat-obatan esensial, serta lingkungan yang mendukung kehidupan yang sehat dan

layak. Kudeta militer Myanmar 2021 secara drastis menghancurkan fondasi sistem kesehatan nasional. Salah satu penyebab utamanya adalah keterlibatan besar tenaga medis dalam Civil Disobedience Movement (CDM), di mana ribuan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan menolak bekerja di fasilitas yang dikuasai militer sebagai bentuk protes (Human Rights Watch 2022). Akibatnya, banyak rumah sakit umum lumpuh, dan layanan kesehatan di berbagai wilayah menjadi sangat terbatas.

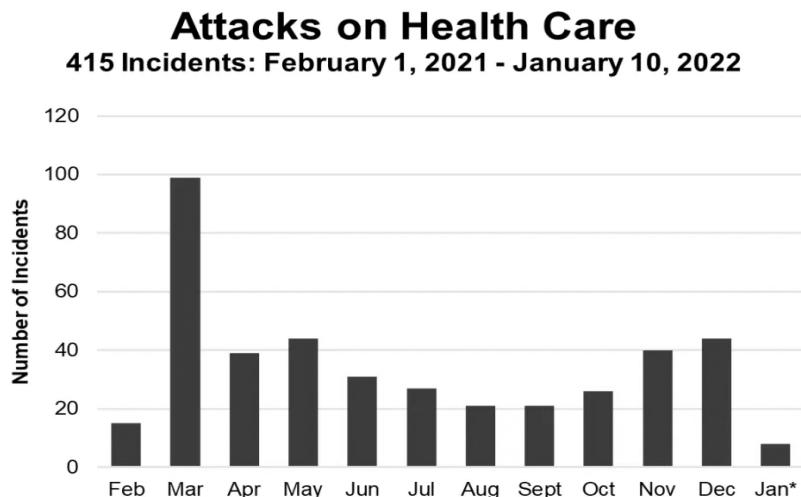
Kudeta juga memperburuk tekanan fisik, mental, dan sosial yang sudah dialami masyarakat akibat pandemi COVID-19. Ketidakpercayaan publik terhadap otoritas militer menyebabkan penolakan terhadap program vaksinasi dan layanan medis yang disediakan negara (Simpson 2022). Bahkan, sejumlah laporan menyebut militer secara langsung menyasar fasilitas medis dan menangkap tenaga kesehatan yang terlibat dalam protes (Murata 2024). Kondisi ini menimbulkan kelangkaan obat-obatan, melonjaknya harga alat kesehatan, dan semakin membatasi akses masyarakat terhadap layanan vital. Dengan demikian, hak atas kesehatan masyarakat Myanmar tidak hanya diabaikan, tetapi juga dijadikan bagian dari strategi represi politik pascakudeta.

Data memperkuat gambaran krisis tersebut. Gambar 2 menunjukkan bahwa sejak kudeta, terjadi setidaknya 415 serangan terhadap sektor kesehatan, menjadikan tenaga medis target langsung kekerasan negara. Bentuk serangan meliputi penangkapan sewenang-wenang, penahanan, hingga kekerasan fisik terhadap dokter, perawat, paramedis, dan relawan. Jumlah tertinggi tercatat pada Maret 2021, dengan tren peningkatan insiden kembali sejak September 2021 hingga Januari 2022. Sebagaimana terlihat pada Grafik 2, Laporan Physicians for Human Rights (2021) mendokumentasikan 125 kasus penahanan yang melibatkan 286 tenaga kesehatan, sebagian ditangkap secara massal. Sebanyak 596 tenaga kesehatan terpaksa bersembunyi untuk menghindari surat penangkapan, 132 orang ditangkap, 82 masih ditahan hingga Januari 2022, dan setidaknya 25 dokter diberat tuduhan berat seperti pengkhianatan. Sejak awal kudeta, 30 tenaga medis dilaporkan terbunuh. Data ini menggambarkan bahwa sistem kesehatan tidak hanya dilumpuhkan, tetapi juga dijadikan sasaran politik, sehingga masyarakat kehilangan akses terhadap pelayanan medis yang aman dan layak di tengah pandemi global.

Overview of Attacks on Health Care

 415 Reported Incidents	 286 Health Workers Arrested	 128 Health Facilities Attacked	 30 Health Workers Killed
--	---	--	--

Gambar 2. Jumlah Serangan terhadap Sektor Kesehatan



Grafik 2. Serangan terhadap Sektor Kesehatan

Sumber: Physicians for Human Rights (2021)

Dimensi keamanan kesehatan juga memperlihatkan bagaimana perempuan menghadapi kerentanan ganda. Selama pandemi COVID-19, kasus kekerasan domestik meningkat tajam di berbagai negara akibat kebijakan lockdown yang memaksa korban hidup bersama pelaku. UN Women (2021) mencatat bahwa satu dari tiga perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan berbasis gender, baik fisik maupun seksual. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan di luar situasi konflik bersenjata, perempuan tetap menjadi kelompok paling rentan dalam konteks kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Krisis Myanmar dan Stabilitas Asia Tenggara

Temuan di atas menunjukkan bahwa kudeta militer Myanmar pada Februari 2021 telah memicu krisis politik dan kemanusiaan yang dampaknya melampaui batas domestik. Sebagai anggota ASEAN, Myanmar seharusnya berkontribusi pada stabilitas kawasan, tetapi tindakan militer yang menggulingkan pemerintahan sah justru menimbulkan gelombang kekerasan dan pelanggaran HAM, sehingga menciptakan dilema besar bagi ASEAN dan negara-negara tetangga (ASEAN Parliamentarians for Human Rights 2025). Situasi ini menunjukkan bagaimana instabilitas internal Myanmar segera menghasilkan tantangan lintas batas berupa arus pengungsi, potensi konflik, dan disintegrasi sosial-politik yang dapat memicu ketegangan regional.

Gelombang migrasi paksa menjadi dampak paling nyata dari krisis tersebut. Caballero-Anthony (2023) menyoroti bahwa fenomena ini memperlihatkan kelemahan ASEAN Political-Security Community dalam menghadapi ancaman non-tradisional, khususnya krisis pengungsi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ASEAN dibangun di atas prinsip solidaritas dan konsensus, ketika berhadapan dengan krisis kemanusiaan seperti Myanmar, mekanisme regional masih belum mampu melindungi pengungsi atau kelompok terdampak secara memadai.

ASEAN mencoba merespons melalui Five-Point Consensus pada April 2021 (ASEAN 2021), yang berisi komitmen untuk mengakhiri kekerasan, memulai dialog, serta menyalurkan bantuan kemanusiaan. Namun, implementasinya terbukti lamban dan tidak efektif. Kekerasan tetap berlangsung, sementara junta militer secara terang-terangan mengabaikan tekanan regional maupun internasional. Hal ini memperlihatkan keterbatasan ASEAN dalam menangani pelanggaran demokrasi anggotanya sendiri, sejalan dengan temuan bahwa prinsip non-intervensi sering kali menjadi penghalang bagi tindakan kolektif.

Dari sisi geopolitik, Vaghji (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan aktor eksternal seperti Tiongkok dan Rusia menambah kompleksitas krisis, karena kepentingan strategis kedua negara tersebut melemahkan tekanan internasional. Sementara itu, UNHCR (2024) mencatat arus pengungsi ke negara-negara tetangga—Thailand, India, dan Bangladesh—yang memperparah beban negara tujuan, terutama ketika mereka masih dalam masa pemulihan pascapandemi dan belum memiliki sistem perlindungan pengungsi yang kuat. Fakta ini menegaskan bahwa krisis Myanmar tidak

bisa dipandang hanya sebagai isu domestik, tetapi sebagai ancaman nyata terhadap keamanan manusia di tingkat regional.

Strangio (2021) menambahkan bukti lebih konkret: ribuan etnis Karen melarikan diri ke Thailand, sementara Malaysia dan Indonesia menghadapi arus pengungsi baru dari berbagai latar belakang politik dan etnis. Novia dan Djalantik (2024) menegaskan bahwa kondisi para pengungsi di negara tujuan umumnya tidak aman, diwarnai diskriminasi, dan terbatas aksesnya terhadap layanan dasar. Akibatnya, potensi ketegangan sosial dengan masyarakat lokal semakin besar, terutama terkait perebutan sumber daya.

Krisis Rohingya semakin meneguhkan dimensi regional dari masalah ini. Amnesty International (2022) menekankan bahwa gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh pada November 2022 mencerminkan keputusasaan mereka dalam mencari perlindungan, meskipun harus mempertaruhkan nyawa di laut. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa krisis Myanmar telah meluas menjadi problem regional yang menguji solidaritas ASEAN sekaligus kapasitas negara-negara anggotanya dalam melindungi HAM.

Akhirnya, Tucker (2023) menyoroti bahwa ketiadaan mekanisme sanksi membuat junta Myanmar dapat mengabaikan Five-Point Consensus tanpa konsekuensi nyata. Prinsip non-intervensi yang masih mendominasi ASEAN semakin membatasi ruang gerak organisasi untuk merespons krisis secara efektif. Dengan demikian, meskipun ASEAN Political-Security Community dibangun atas dasar solidaritas dan kolaborasi, tarik-menarik kepentingan dan lemahnya mekanisme penegakan memperlihatkan keterbatasan mendasar ASEAN dalam menghadapi kudeta Myanmar.

Krisis Myanmar menegaskan bahwa tata kelola keamanan kawasan Asia Tenggara saat ini tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan multidimensi. Mekanisme ASEAN yang bertumpu pada prinsip konsensus dan non-intervensi terbukti lemah ketika berhadapan dengan pelanggaran HAM masif, migrasi paksa, dan represi politik. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi tata kelola keamanan regional yang lebih responsif dan inklusif. Reformulasi ini berarti menggeser fokus dari stabilitas negara semata menuju perlindungan individu, dengan menjadikan hak asasi manusia dan kebutuhan kemanusiaan sebagai inti agenda keamanan kawasan. Tanpa orientasi baru ini, ASEAN berisiko kehilangan legitimasi dan relevansinya sebagai aktor regional, sementara krisis-krisis serupa akan terus mengancam integritas politik dan sosial Asia Tenggara.

Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa kudeta militer di Myanmar pada Februari 2021 telah menimbulkan dampak multidimensi, baik terhadap keamanan manusia di dalam negeri maupun terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. Dari sisi politik, kudeta ini menjadi kemunduran besar bagi proses demokratisasi Myanmar sekaligus memperlihatkan keterbatasan mekanisme kolektif ASEAN yang masih terikat pada prinsip non-intervensi dan ketiadaan instrumen penegakan hukum yang efektif. Dari perspektif keamanan manusia, pascakudeta ditandai dengan meningkatnya represi terhadap warga sipil, runtuhnya layanan kesehatan, pelanggaran hak asasi manusia, serta arus pengungsi yang meluas ke negara-negara tetangga. Temuan ini menegaskan bahwa keamanan dan stabilitas kawasan tidak dapat hanya dipahami dari sudut pandang politik formal negara, melainkan juga harus mencakup dimensi keamanan manusia yang lebih luas.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup analisis yang hanya berfokus pada tiga dimensi keamanan manusia, yaitu keamanan personal, politik, dan kesehatan. Dimensi lain yang dirumuskan UNDP—seperti keamanan ekonomi, pangan, lingkungan, dan komunitas—tidak dianalisis secara mendalam, sehingga memberikan gambaran yang belum sepenuhnya komprehensif tentang dampak krisis Myanmar terhadap keamanan manusia.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan kajian yang lebih holistik dengan menelaah seluruh dimensi keamanan manusia dalam kerangka UNDP agar dapat menggambarkan keterkaitan antar aspek secara lebih utuh. Penelitian mendatang juga dapat mengkaji secara lebih spesifik peran ASEAN Political-Security Community dan aktor internasional dalam merespons krisis, serta menelaah mekanisme regional yang lebih responsif dan berorientasi pada perlindungan HAM dan kebutuhan kemanusiaan.

Referensi

- Amnesty International. 2022. “More than 200 Rohingya Refugees Land in Indonesia as Country Hosts G20.” *Amnesty International*, November 2022. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/more-than-200-rohingya-refugees-land-in-indonesia-as-country-hosts-g20/11/2022/>

- ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR). 2025. “Open Letter from ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) on Advancing the Peace Process in Myanmar.” *ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)*. <https://aseanmp.org/publications/post/open-letter-from-asean-parliamentarians-for-human-rights-aphr-on-advancing-the-peace-process-in-myanmar/>
- ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). 2021. “Chairman’s Statement on the ASEAN Leaders’ Meeting, 24 April 2021 and Five-Point Consensus.” <https://asean.org/chairmans-statement-on-the-asean-leaders-meeting-24-april-2021-and-five-point-consensus/>
- Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Caballero-Anthony, Mely. 2023. “ASEAN and the Myanmar Humanitarian Crisis: Overcoming Challenges and Identifying Pathways.” Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect, The University of Queensland Australia. https://r2pasiapacific.org/files/9923/2023_ASEAN_Myanmar_Humanitarian_Crisis.pdf
- Caballero-Anthony, Mely. 2020. “Security Governance and ASEAN’s Political Security Community: Fragmented but Inclusive Security Communities?”. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences* 13:151–167. DOI:10.1007/s40647-019-00269-z
- Chambers, Justine, and Nick Cheesman. 2024. “Introduction: Revolution and Solidarity in Myanmar.” *Journal of Contemporary Asia* 54(5): 741-758. <https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/00472336.2024.2371976?scroll=top&needAccess=true>
- Chandler, David. 2012. “Resilience and Human Security: The Post-Interventionist Paradigm.” *Security Dialogue* 43 (3): 213-229. <https://doi.org/10.1177/0967010612444151>
- Chongkittavorn, Kavi. 2022. August 10. “ASEAN Hardens Position on Myanmar.” *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia*. <https://www.eria.org/news-and-views/asean-hardens-position-on-myanmar>
- Connelly, Aaron, and Shona Loong. 2023. “The Relationship between Myanmar’s Past and Its Future.” *Adelphi Series* 63 (505–507): 115–34. <https://doi.org/10.1080/19445571.2024.2359332>

- Ganesan, Narayanan. 2023. "Myanmar's 2021 Military Coup, Its Impact on Domestic Politics, and a Revolutionary Road to Democratization?" *Asian Journal of Peacebuilding* 11 (2): 311–29. <https://doi.org/10.18588/202311.00a392>
- Gayatri, Irene Hiraswari. 2021. "What's Wrong with ASEAN Responses to the Myanmar Crisis?" *The Jakarta Post*, March 22. <https://www.thejakartapost.com/paper/2021/03/22/whats-wrong-with-asean-responses-to-the-myanmar-crisis.html>
- Human Right Watch. 2022. "Myanmar Events 2022." *Human Right Watch*. <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/myanmar>
- Human Right Watch. 2024. "Myanmar Events of 2023." *Human Right Watch*. <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/myanmar#73fcc>
- International Crisis Group. 2021. "Responding to the Myanmar Coup." *International Crisis Group*. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/b166-responding-myanmar-coup>
- Kaldor, Mary. 2013. "In Defence of New Wars." *Stability* 2 (1). <https://doi.org/10.5334/sta.at>
- Khai, Tual Sawn. 2023. "Vulnerability to Health and Well-Being of Internally Displaced Persons (IDPs) in Myanmar Post-Military Coup and COVID-19." *Archives of Public Health* 81 (1). <https://doi.org/10.1186/s13690-023-01204-1>.
- King, Anna S. 2022. "Myanmar's Coup d'état and the Struggle for Federal Democracy and Inclusive Government." *Religions* 2022 13(7): 594. <https://doi.org/10.3390/rel13070594>
- Kusuma, Ayusia Shabita. 2023. "Between COVID-19, Coup, and Conflict: Multi-dimensional Threats to Human Security in Myanmar." *KnE Social Sciences*, February. <http://dx.doi.org/10.18502/kss.v8i3.12828>
- Marash, Nick. 2021. "Kudeta Myanmar Membuat Layanan Kesehatan Nyaris Kolaps: 'Saya Tidak Akan Kembali Bekerja.' BBC News Indonesia, 27 April. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56883836>
- Mohapatra, Anil Kumar. "Securing the Insecure: An Insight into Human Security in Myanmar." In *Human Security in Asia: Interrogating*

State, Society and Policy, edited by Debasish Nandy and Debnan Majee. Palgrave MacMillan.

Molyneux, Camilla. 2024. 2024. “The Use and Impact of Explosive Weapons in Myanmar: What Do We Know from Existing Data?”. *Fragments: Explosive Weapon Monitor Quarterly* 2(3). https://ewm.ams3.digitaloceanspaces.com/ewm/EWM_Fragments_Vol_2_Issue_3_2acf667cb3.pdf

Murata, Shinjiro. 2024. “Myanmar on the Brink: A Population in Desperate Need.” *Medecins Sans Frontieres*. <https://msfsouthasia.org/myanmar-on-the-brink-a-population-in-desperate-need/>

Novia, Hana, and Sukawarsini Djelantik. 2024. “Indonesia Diplomacy in Protecting the Rights of Indonesian Migrant Domestic Workers in Malaysia (2017-2022).” *Insignia Journal of International Relations* 11 (1): 51–69.

Pearson, Isabllle, Elaine Chase, Cing Van Kim, Nang Ma San. 2025. “Conflict Exposure and Mental Health: A Survey of Adolescent Girls and Young Women in Myanmar Post the 2021 Coup D’état.” *Conflict and Health* 19(1). DOI:10.1186/s13031-025-00668-y

Physicians for Human Rights. 2021. “‘Our Health Workers Are Working in Fear’: After Myanmar’s Military Coup, One Year of Targeted Violence against Health Care.” *Physicians for Human Rights*. <https://phr.org/our-work/resources/one-year-anniversary-of-the-myanmar-coup-detat/>

Rainer, Elise dan Anish Goel. 2020. “Self-Inflicted Instability: Myanmar and the Interlinkage between Human Rights, Democracy and Global Security.” *Democracy and Security* 16(4): 334-350. <https://doi.org/10.1080/17419166.2020.1811968>

Sharma, Raagini Shekher. 2022. “Security, Economic and Socio-Political Situation of Post-Coup Myanmar.” *NIICE Commentary* 7967, 26 May. <https://niice.org.np/archives/7967>

Simpson, Adam, and Nicholas Farrelly. 2024. *Myanmar: Politics, Economy and Society*. Routledge.

Simpson, Adam. 2022. “Coups, Conflicts, and COVID-19 in Myanmar: Humanitarian Intervention and Responsibility to Protect in Intractable Crises.” *Brown Journal of World Affairs* XXVIII(1). <https://bjwa.brown.edu/28-1/coups-conflicts-and-covid-19-in>

myanmar-humanitarian-intervention-and-responsibility-to-protect-in-intractable-crises/

Situmorang, Mangadar. 2021. “R2P in Myanmar is Justified.” *The Jakarta Post*, March 15.

Shue, Henry. 1996. *Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy*. Princeton University Press.

Strangio, Sebastian. 2021. “Myanmar’s Crisis Is Starting to Spill Beyond Its Borders.” *The Diplomat*, March. <https://thediplomat.com/2021/03/myanmars-crisis-is-starting-to-spill-beyond-its-borders/>

The Economist. 2021. “Myanmar Records Its Deadliest Day of Pro-Democracy Protests.” *The Economist*, February 28. <https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/28/myanmar-records-its-deadliest-day-of-pro-democracy-protests>

The UN Refugee Agency. 2024. “Myanmar Emergency.” *UNHCR*. <https://www.unhcr.org/emergencies/myanmar-emergency>

Trihartono, Agus. 2018. “Myanmar’s Worsening Rohingya Crisis: A Call for Responsibility to Protect and ASEAN’s Response.” In *Sustainable Future for Human Security Society, Cities and Governance*, edited by Benjamin McLellan. Springer Nature.

Tucker, Sydney. 2023. “Myanmar Reveals ASEAN’s Weak Spot Again.” *STIMSON*, July. <https://www.stimson.org/2023/myanmar-reveals-aseans-weak-spot-again/>

UN News. 2021. “Myanmar: 3 Million in Need of Humanitarian Aid, ‘World Is Watching’ UN Relief Chief Warns Generals.” *United Nation News*, November 8. <https://news.un.org/en/story/2021/11/1105202>

UN Women. 2021. “Measuring the Shadow Pandemic: Violence against Women during COVID-19.” <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19>

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). 2023. “Asylum in Thailand.” *UNHCR The UN Refugee Agency*. <https://help.unhcr.org/thailand/asylum/>

United Nations. 2009. “Human Security in Theory And Practice.” United Nations Trust Fund for Human Security. New York. https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=11983

- United Nations. 2023. “Collecting the Evidence Needed to Ensure That Perpetrators of Serious International Crimes in Myanmar Face Justice.” *The Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM)*. <https://iimm.un.org/>
- United Nations Development Programme. 2004. “Human Development Report 2004 : Cultural Liberty in Today’s Diverse World.” *Human Development Report*. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2004>
- Vaghji, Syah. 2023. “The Dwindling Prospects for Russian and Chinese-Backed Infrastructure Projects in Myanmar.” *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2023/11/the-dwindling-prospects-for-russian-and-chinese-backed-infrastructure-projects-in-myanmar/>
- Ware, Anthony, and Monique Skidmore (Eds.). 2021. *After the Coup: Myanmar’s Political and Humanitarian Crises*. ANU Press.
- Williams, Paul D. 2012. *Security Studies: An Introduction*. Routledge.